



JURNAL CITRA MULTIDISIPLIN



Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti

DEPRESIASI RUPIAH DAN KERENTANAN EKONOMI MASYARAKAT: ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA

Putri Nurjana¹⁾, Lulu Aperianti²⁾, Sofa Sofiyanty³⁾

Universitas Bangka Belitung

¹⁾ putrinurjana145@gmail.com, ²⁾ luluaperianti123@gmail.com, ³⁾ sofasofiyanty7@gmail.com

Histori artikel

Received:
3 June 2026

Accepted:
19 June 2026

Published:
21 June 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak depresiasi rupiah terhadap kerentanan ekonomi masyarakat dan efektivitas kebijakan pangan pemerintah dalam merespons kondisi tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meningkatkan biaya impor komoditas pangan dan bahan baku produksi sehingga mendorong kenaikan harga pangan domestik, dan menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, data Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta laporan kebijakan pemerintah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa depresiasi rupiah berkontribusi terhadap inflasi pangan dan meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat. Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui subsidi pangan, operasi pasar, bantuan sosial, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan nasional. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketimpangan distribusi pangan antarwilayah, ketergantungan pada impor komoditas strategis, serta keterbatasan akses kelompok rentan terhadap program pangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pangan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Kata-kata Kunci: Depresiasi rupiah, kerentanan ekonomi, kebijakan pangan, inflasi pangan, ketahanan pangan

*Penulis koresponding : Putri Nurjana (putrinurjana145@gmail.com)

Abstract. This study aims to analyze the impact of rupiah depreciation on the economic vulnerability of the community and the effectiveness of government food policies in responding to this condition. The weakening of the rupiah exchange rate against the US dollar increases the cost of importing food commodities and raw materials, thereby driving up domestic food prices and reducing purchasing power, especially for low-income groups. This study uses a literature study method by reviewing scientific journals, books, data from the Central Statistics Agency (BPS), the National Food Agency, and relevant government policy reports. The results show that rupiah depreciation contributes to food inflation and increases the economic vulnerability of the community. The government responds to this condition through food subsidies, market operations, social assistance, price stabilization, and strengthening national food reserves. These policies are quite effective in maintaining price stability and food availability, but their implementation still faces obstacles such as inequality in food distribution between regions, dependence on imports of strategic commodities, and limited access to food programs for vulnerable groups. Therefore, a more integrated, targeted, and sustainable food policy is needed to strengthen the community's economic resilience.

Keywords: Rupiah depreciation, economic vulnerability, food policy, food inflation, food security.

Latar Belakang

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar AS telah menjadi isu krusial atas kebutuhan dasar masyarakat. Sepanjang triwulan pertama tahun 2026, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) bergerak di kisaran Rp16.600 hingga Rp17.300 (Kemenag RI, 2026). Dan ketidakstabilan nilai tukar mata uang menjadikan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, hingga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Mawardi, 2023).

Sektor impor dan ekspor adalah salah satu sumber kekhawatiran besar saat ini terhadap lemahnya mata uang suatu negara, karena memicu dampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri, hingga berakhir pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat (Ardian et al., 2024; Nuraya, 2025). Dan pangan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap kondisi ini, mengingat sebagian besar komoditas pangan masih bergantung pada impor (Viona et al., 2025). Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang keberadaannya sangat menentukan stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara (Farid et al., 2019). Artinya pangan adalah persoalan penting yang harus di jaga stabilitas keamanan harganya. Ketika nilai tukar Rupiah melemah, harga pangan cenderung mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya impor bahan pangan, pupuk, pakan ternak, dan berbagai komponen produksi lainnya. Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor beberapa komoditas strategis seperti gandum, kedelai, gula, dan daging menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga pangan domestik (Rassi et al., 2025). Dalam kenaikan harga pangan tidak hanya berdampak

pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat memperburuk tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kesejahteraan yang terjadi, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi pangan (Amalia et al., 2025). Dan persoalan kerentanan ekonomi bukan hanya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga berhubungan dengan

ketidakstabilan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat menurun sementara harga kebutuhan pokok meningkat, tingkat kerentanan ekonomi masyarakat menjadi semakin tinggi (Ompusunggu et al., 2025).

Kebijakan pangan memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar (Harahap, 2024). Ada beberapa upaya pemerintah yang tertuang dalam kebijakannya, dan telah diimplementasikan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, seperti subsidi, operasi pasar, serta penguatan cadangan pangan nasional (Ariandini et al., 2025). Namun keadaan yang terjadi saat ini, efektivitas kebijakan pangan terhadap dampak depresiasi Rupiah masih menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mengendalikan dampak pelemahan Rupiah terhadap stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ketidakefektifan kebijakan pangan dapat memperbesar risiko kerentanan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan (Zain et al., 2026). Selain itu, dalam distribusi bantuan pangan dan program stabilisasi harga terkadang belum berjalan secara optimal, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan belum merasakan manfaatnya secara merata.

Urgensi dalam penelitian ini mengenai dampak yang terjadi secara langsung akibat dari depresiasi Rupiah. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti urgensi yang terjadi tersebut untuk menjelaskan bagaimana proses dari depresiasi Rupiah yang dapat merambat masuk pada kerentanan ekonomi masyarakat terutama pada stabilitas pangan, dan melihat kebijakan pemerintah atas respon terhadap dampak yang terjadi hingga mengguncang kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hasil penelitian ini bertujuan untuk mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan depresiasi yang mampu mempengaruhi harga dan akses pangan secara langsung, serta dapat menganalisis efektivitas cara kerja pemerintah dalam kebijakannya untuk menangani kerentanan ekonomi yang terjadi akibat depresiasi Rupiah.

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Pramono, 2020) ; a) Identifikasi masalah kebijakan, b) Penyusunan agenda, c) Perumusan kebijakan, d) Pengesahan kebijakan, e) Implementasi kebijakan.

Depresiasi rupiah dan ketahanan pangan, pemerintah diharuskan mengambil kebijakan yang objektif serta tepat sasaran guna mengurangi kerentanan ekonomi

masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pangan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan tindakan pemerintah menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

Metode

Penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih secara komprehensif untuk mengkaji berbagai konsep, teori, data, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan diversifikasi pangan lokal sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Studi literatur (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, website, dan sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan ataupun format digital yang relevan dengan objek yang sedang diteliti (Febrianto & Siroj, 2024). Dan literatur jurnal atau buku yang digunakan diprioritaskan berasal dari periode 2017–2026 untuk mendapatkan informasi yang aktual dan relevan.

Menurut Indra dan Cahya Ningrum (2019) studi literatur adalah suatu studi deskriptif untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan (Made, P., dan Ika cahyaningrum, 2018). Dengan itu, penelitian ini menjadikan studi literatur sebagai fondasi dasar dan utama dalam penelitian serta membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar dapat menjawab rumusan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Depresiasi Rupiah Mempengaruhi Harga, Akses Pangan, dan Peningkatan Pada Kerentanan Ekonomi Masyarakat

Depresiasi Rupiah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia, terutama melalui peningkatan harga pangan dan bertambahnya kerentanan ekonomi rumah tangga. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan biaya impor berbagai komoditas pangan dan bahan baku produksi menjadi lebih mahal. Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis, seperti gandum, kedelai, gula, bawang putih, serta bahan baku pakan ternak. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat sehingga harga berbagai komoditas pangan di pasar domestik turut mengalami kenaikan (Ibrohim et al., 2025).

Nilai tukar Rupiah selama periode 2025 hingga awal 2026 mengalami tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, serta meningkatnya permintaan dolar AS di pasar internasional. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya distribusi, transportasi, dan produksi pangan. Akibatnya, harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, telur, dan gula mengalami kenaikan di berbagai

daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara pelemahan nilai tukar dan inflasi pangan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada tahun 2024 mencapai 4,88 persen. Selanjutnya, inflasi pangan berada pada kisaran 3,32 persen pada tahun 2025 sebelum kembali meningkat pada awal tahun 2026 akibat tekanan nilai tukar, gangguan distribusi, serta kenaikan biaya produksi pangan. Tingginya inflasi pangan menyebabkan rumah tangga harus mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peningkatan harga kebutuhan pokok sangat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), rumah tangga miskin di Indonesia mengalokasikan lebih dari 74 persen total pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan kelompok miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Ketika harga beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai meningkat, rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tabungan. Selain memengaruhi daya beli, kenaikan harga pangan juga berdampak terhadap akses masyarakat terhadap pangan yang layak dan bergizi. Rumah tangga miskin serta kelompok rentan cenderung membeli bahan pangan yang lebih murah atau mengurangi jumlah konsumsi harian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang dimiliki (Simanjuntak et al., 2025). Dalam kondisi tertentu, sebagian rumah tangga lebih memilih memenuhi kebutuhan pangan pokok dibandingkan menjaga kualitas gizi yang seimbang. Situasi ini meningkatkan risiko kerawanan pangan dan permasalahan gizi, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Tekanan ekonomi akibat tingginya harga pangan juga tercermin dalam data kemiskinan nasional. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6,73 persen, sedangkan di wilayah pedesaan mencapai 11,03 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk pedesaan menghadapi risiko ekonomi yang lebih besar dibandingkan penduduk perkotaan karena tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah dan akses ekonomi yang lebih terbatas. Kerentanan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya garis kemiskinan nasional. Menurut BPS (2025), garis kemiskinan nasional meningkat dari Rp550.458 per kapita per bulan pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp582 ribu pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi Rp609.160 per kapita per bulan pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi pangan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan memiliki risiko yang besar untuk jatuh ke dalam kategori miskin apabila terjadi kenaikan harga pangan atau penurunan pendapatan.

Dampak depresiasi rupiah juga tercermin dalam kondisi ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan data BPS (2025), tingkat pengangguran terbuka Indonesia berada pada kisaran 4,82 persen dengan jumlah pengangguran sekitar 7,28 juta orang. Tingginya angka pengangguran menyebabkan banyak rumah tangga memiliki pendapatan yang tidak stabil sehingga lebih rentan menghadapi kenaikan harga pangan. Di wilayah pedesaan, kondisi tersebut semakin berat karena sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian tradisional. Ketika harga pupuk, benih, dan berbagai sarana produksi meningkat akibat pelemahan nilai tukar, biaya produksi pertanian ikut meningkat, sementara pendapatan petani tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Secara keseluruhan, depresiasi rupiah tidak hanya berdampak pada sektor moneter dan perdagangan internasional, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung. Pelemahan nilai tukar menyebabkan harga pangan meningkat, daya beli menurun, akses terhadap pangan berkualitas menjadi lebih terbatas, serta memperbesar risiko kemiskinan dan kerentanan ekonomi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat rentan.

Efektivitas Kebijakan Pangan Pemerintah dalam Merespon Kerentanan Ekonomi

Ketahanan pangan adalah konsep fundamental dalam pembangunan nasional yang bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi ketika seluruh individu mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk menjalani kehidupan yang sehat. Konsep ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bersifat multidimensi, tidak cuman bergantung pada produksi, tetapi juga distribusi dan kemampuan daya beli masyarakat. Ketahanan pangan mempunyai empat dimensi utama yang saling berkaitan dan harus terpenuhi, yaitu ketersediaan pangan (availability), stabilitas (stability), akses pangan (access), dan pemanfaatan pangan (utilization) (Viona et al., 2025). Ketersediaan pangan merujuk pada adanya pangan dalam jumlah yang cukup melalui produksi domestik, impor, ataupun cadangan pangan yang dimiliki suatu negara. Akses pangan berkaitan dengan kemampuan ekonomis, sosial, dan fisik masyarakat dalam memperoleh pangan yang tersedia.

Ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur distribusi pangan antarwilayah. Pulau Jawa berperan sebagai

pusat produksi dan distribusi pangan nasional, sementara wilayah Indonesia Timur masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan harga dan akses pangan, dimana harga komoditas pangan diluar Pulau Jawa cenderung lebih tinggi akibat biaya logistik. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem pangan nasional masih berpusat dan rentan terhadap ketidakseimbangan distribusi. Data Badan Pusat Statistik dalam menunjukkan bahwa harga beras di wilayah Indonesia Timur lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa, terutama pada saat gangguan distribusi dan musim tertentu. Kondisi ini mempertegas bahwa surplus produksi nasional tidak selalu menjamin keterjangkauan pangan secara merata, karena akses masyarakat sangat dipengaruhi oleh efisiensi logistik, panjangnya rantai distribusi, serta keterbatasan pasar lokal (Untoro & P Putri, 2025). Akibatnya, ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu produksi, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi dan akses pangan antarwilayah.

Kerentanan ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika harga dan distribusi pangan, pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis nasional. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek kecukupan jumlah, mutu, keamanan, keberagaman, gizi, pemerataan, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Dengan demikian, ketahanan pangan yang ideal harus mampu memastikan seluruh individu dapat mengakses pangan yang cukup untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Astacita yang menekankan kemandirian pangan, energi, dan air, serta diwujudkan dalam berbagai program strategis seperti pembangunan lumbung pangan, penguatan cadangan pangan nasional, serta peningkatan produktivitas pertanian. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp155,2 triliun pada tahun 2025 yang difokuskan pada peningkatan produksi, distribusi, stabilisasi harga, serta perlindungan usaha tani (Prasetyo, 2025).

Dalam ekonomi politik kontemporer, terdapat pandangan yang menganggap bahwa masyarakat pedesaan relatif terlindungi dari gejolak makroekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas ekonomi di pedesaan lebih banyak bersifat lokal dan tidak secara langsung berhubungan dengan pasar valuta asing. Namun, dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini, batas antara ekonomi lokal dan global semakin kabur. Fluktuasi nilai tukar dolar tetap memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan melalui mekanisme transmisi harga, terutama pada komoditas impor dan barang kebutuhan pokok. Penguatan

dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berdampak pada meningkatnya biaya impor berbagai komoditas strategis dan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini terjadi karena sejumlah barang konsumsi dan bahan baku produksi masih sangat bergantung pada impor, seperti minyak goreng, gula, kedelai, serta bahan bakar minyak yang seluruh transaksi internasionalnya menggunakan dolar. Kenaikan biaya impor tersebut kemudian ditransmisikan ke harga domestik melalui mekanisme inflasi impor (*imported inflation*), sehingga harga barang kebutuhan pokok di tingkat masyarakat ikut mengalami peningkatan (Ardiansyah, 2026).

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, seperti subsidi pangan, operasi pasar, bantuan sosial, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan nasional, kebijakan pangan pemerintah dapat dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pada saat terjadi tekanan ekonomi akibat depresiasi rupiah. Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan pemerintah menekan laju inflasi pangan melalui intervensi pasar dan menjaga pasokan komoditas strategis agar tetap tersedia di masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial dan bantuan pangan juga berkontribusi dalam menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan.

Efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Dari aspek distribusi, masih terdapat ketimpangan akses pangan antarwilayah, terutama antara Pulau Jawa sebagai pusat produksi dan wilayah Indonesia Timur yang masih menghadapi biaya logistik tinggi. Akibatnya, harga pangan di beberapa daerah relatif lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga ketersediaan pangan secara nasional belum sesuai dengan pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat. Selain persoalan distribusi, ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas strategis seperti gandum, kedelai, gula, dan bahan baku produksi pangan masih menjadi tantangan utama. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor meningkat dan mendorong kenaikan harga pangan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang ada belum sepenuhnya mampu mengurangi kerentanan sektor pangan terhadap fluktuasi nilai tukar dan pasar global.

Akses kelompok rentan terhadap program pangan juga masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun bantuan sosial dan program stabilisasi harga telah dijalankan, manfaat kebijakan belum selalu diterima secara merata oleh masyarakat miskin, masyarakat pedesaan, maupun daerah terpencil akibat keterbatasan distribusi dan jangkauan program. Selain itu, sebagian besar kebijakan pangan masih berorientasi pada pengendalian harga dalam jangka pendek sehingga belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural, seperti peningkatan produktivitas pangan domestik, efisiensi rantai distribusi, dan pengurangan ketergantungan impor. Kebijakan pangan pemerintah dapat dikategorikan cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, namun belum optimal dalam aspek pemerataan distribusi, pengurangan ketergantungan impor, perluasan akses kelompok rentan, serta

keberlanjutan program pangan jangka panjang. Sehingga, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar ketahanan pangan mampu memberikan perlindungan yang lebih merata terhadap kerentanan ekonomi masyarakat.

Dalam Teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye

Efektivitas kebijakan pangan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan tindakan pemerintah menghadapi dampak yang ditimbulkan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Thomas R. Dye (2001) dalam menguraikan proses kebijakan publik menjadi beberapa tahapan, di antaranya;

1. Identifikasi Masalah Kebijakan

Pemerintah mengidentifikasi adanya depresiasi pada Rupiah, yang berujung menyebabkan persoalan kenaikan harga bahan pangan, meningkatnya inflasi, dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi yang mengakibatkan terjadinya kerentanan ekonomi secara langsung bagi masyarakat terhadap lonjakan harga pangan, terutama pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Kenaikan harga yang tidak terkendali menyebabkan konsumen dan bisnis kesulitan dalam membuat keputusan ekonomi jangka panjang. Ketika inflasi meningkat dan daya beli uang menurun, konsumen harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang sama (Tarumingkeng, 2024). Dampak ini, paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, transportasi, dan energi. Keadaan yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Masyarakat ini, menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka pada kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan transportasi, setiap kenaikan harga secara langsung mengurangi daya beli mereka. Mereka lebih rentan terhadap kerentanan ekonomi, yaitu ketika harga makanan, seperti beras, minyak goreng, dan daging, meningkat tajam. Misalnya, ketika harga minyak goreng melonjak akibat gangguan pasokan atau kebijakan perdagangan internasional, kelompok berpenghasilan rendah akan menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, mengurangi uang yang tersedia untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan.

2. Penyusunan Agenda

Permasalahan stabilitas pangan dan dampak dari pelemahan Rupiah kemudian berjalan dari dampak yang timbul kepada isu strategis yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar Rupiah (yang berada di kisaran Rp17.600 per dolar AS) memicu fenomena *imported inflation* (inflasi impor) yang secara langsung mengancam stabilitas pangan. Hal ini menjadi isu strategis karena

menggerus daya beli masyarakat dan membebani kelompok rentan, berpotensi memicu lonjakan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi nasional ketika tidak dikelola dengan tepat.

Sinergi antara ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi pada akhirnya tidak hanya bertujuan menjaga harga pangan tetap terjangkau, tetapi juga menciptakan perekonomian daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat daya saing daerah. Lebih jauh lagi, pengendalian inflasi pangan juga berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama pada tujuan menghapus kemiskinan (SDG 1) dan mengakhiri kelaparan (SDG 2) (Irhamisyah, 2019).

3. Perumusan Kebijakan

Merumuskan beberapa kebijakan sebagai penunjang atas kerentanan yang terjadi di Indonesia, seperti subsidi pangan, operasi pasar, bantuan sosial, pengendalian impor, dan stabilisasi harga bahan pokok untuk mengurangi dampak depresiasi rupiah (Ariandini et al., 2025). Pemerintah memberikan bantuan dana atau menanggung sebagian biaya bahan pangan tertentu agar harga jual di masyarakat tetap terjangkau. Subsidi membantu menekan kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat tidak turun drastis. Serta mengatur jumlah dan waktu impor bahan pangan agar tetap dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga di dalam negeri. Dengan pengendalian impor, pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan menjaga ketersediaan pangan domestik. Menetapkan kebijakan tertentu sebagai penunjang seperti harga eceran tertinggi (HET), distribusi cadangan pangan, atau pengawasan pasar untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Kebijakan ini bertujuan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tidak terlalu terdampak oleh inflasi akibat depresiasi rupiah.

4. Pengesahan Kebijakan

Kebijakan yang disahkan melalui peraturan pemerintah atau keputusan lembaga terkait sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik lahir dari pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Artinya, ketika pemerintah melihat bahwa pelemahan rupiah berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah kemudian menyusun kebijakan sebagai bentuk respons terhadap masalah seperti adanya masalah ekonomi yang dirasakan masyarakat, munculnya tuntutan atau kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Dan berakhir pada pemerintah yang mempertimbangkan berbagai solusi untuk menetapkan kebijakan yang dianggap paling tepat terhadap permasalahannya. Dengan adanya dasar hukum ini, pemerintah dapat menjalankan program seperti subsidi pangan, operasi pasar, bantuan sosial, dan stabilisasi harga guna mengurangi dampak depresiasi rupiah terhadap

masyarakat.

5. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan pada program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi akibat pelemahan rupiah. Pada tahap ini, efektivitas kebijakan pangan dapat dinilai dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga pangan, dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Teori proses kebijakan publik dari Thomas R. Dye digunakan untuk memahami pemerintah merancang dan melaksanakan kebijakan pangan dalam menghadapi dampak depresiasi rupiah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah melaksanakan berbagai program seperti subsidi pangan, operasi pasar, bantuan sosial, stabilisasi harga, serta pengendalian distribusi bahan pokok. Program dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun akibat kenaikan harga pangan yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah (Ariandini et al., 2025). Pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa inflasi Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran 2,92% (year on year) dan masih berada dalam target nasional sebesar 1,5–3,5%. Selain itu, rata-rata inflasi pangan bergejolak (volatile food) mengalami penurunan dari 4,88% pada tahun 2024 menjadi 3,32% pada tahun 2025. Menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah cukup berhasil dalam mengendalikan kenaikan harga pangan. Namun, meskipun terjadi perubahan, kebijakan pemerintah masih memerlukan evaluasi. Hal ini terlihat dari inflasi kelompok pangan yang masih relatif tinggi sebesar 6,21% akibat keterbatasan pasokan dan gangguan cuaca. Dalam aksesibilitasnya, GPM (Gerakan Pangan Murah) sering tidak mencapai kelompok paling rentan karena lokasi gelar yang tidak tepat, informasi publik yang buruk, kuota terbatas, atau persyaratan pembelian yang mempersulit. Inflasi pangan, intervensi menahan harga pada titik dan periode pelaksanaan, tetapi tidak menurunkan inflasi secara berkelanjutan karena ketergantungan pada frekuensi kegiatan, anggaran, dan rantai pasok.

Stabilitas harga, program bersifat mitigasi sementara dan tidak menyelesaikan masalah struktural seperti ketergantungan impor dan biaya logistik. Selain itu, harga pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam masih menjadi penyumbang inflasi di beberapa periode tahun 2025 (Indonesia, 2025). Kebanyakan program- program pangan dirancang hanya untuk kondisi nilai tukar stabil, bukan untuk menghadapi tekanan depresiasi yang signifikan. Program bersifat mitigate gejala (kenaikan harga konsumen) tetapi tidak mengatasi penyebab struktural (biaya produksi dan logistik yang naik akibat depresiasi).

Kerentanan ekonomi masyarakat masih terlihat dari meningkatnya garis kemiskinan nasional dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) menjadi Rp609.160 per kapita per bulan

pada Maret 2025 atau naik 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama makanan, masih mengalami tekanan harga. Selain itu, tingkat kemiskinan di pedesaan masih mencapai 11,03%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,73%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi akibat kenaikan harga pangan belum sepenuhnya dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah. Dalam kondisi ini, pemerintah telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjaga stabilitas inflasi dan harga pangan, namun masih diperlukan perbaikan dalam implementasi kebijakannya agar perlindungan terhadap masyarakat rentan dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa depresiasi rupiah telah terbukti meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat melalui kenaikan harga pangan dan penurunan daya beli, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Pelemahan nilai tukar meningkatkan biaya impor komoditas pangan strategis dan bahan baku, sehingga mendorong inflasi pangan dan meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Situasi ini tidak hanya membatasi akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi, tetapi juga meningkatkan risiko kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.

Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pangan, seperti subsidi pangan, operasi pasar, bantuan sosial, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan nasional. Kebijakan-kebijakan ini dianggap cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan serta mengurangi dampak inflasi pada kelompok rentan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan seperti distribusi pangan yang tidak merata antar wilayah, ketergantungan pada impor komoditas strategis, dan akses yang tidak merata terhadap program pangan bagi masyarakat rentan. Oleh karena itu, perlu penguatan kebijakan pangan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, perbaikan sistem distribusi dan logistik, pengurangan ketergantungan impor, dan perluasan jangkauan perlindungan sosial untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Amalia, N., Firdaus, A. S., & Malik, A. (2025). *The impact of poverty on food stability in a household economic perspective*, November, 10253–10260.
- Ananda, G., Septiyanti, P., Putri, D. H., & Zirani, N. D. (2025). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. 2(June), 802–808.

- Ardian, A., Sandi, A., Taqiyah, D. B., & Harun, M. (2024). Analisis pengaruh depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada bidang ekspor dan impor. 3(3), 90–101.
- Ardiansyah. (2026, May 17). Dampak nyata fluktuasi dolar terhadap ekonomi pedesaan. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2026/05/17/135000926/dampak-nyata-fluktuasi-dolar-terhadap-ekonomi-pedesaan?page=all>
- Ariandini, D., Soerjatisnanta, H., & Firmansyah, A. A. (2025). Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, 1886–1894.
- Badan Pangan Nasional. (2026). *Inflasi 2025 stabil di 2,92 persen, Bapanas terus jaga stabilitas pangan*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/inflasi-2025-stabil-di-292-persen-bapanas-terus-jaga-stabilitas-pangan>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025*.
- Daulay, J., Kaloko, N., Ria, R., Hasibuan, A., & Sari, S. K. (2025). Kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia: Tantangan urbanisasi dan peluang diversifikasi. 4(4), 219–225.
- Dewi. (2021). *Kebijakan publik* (Harsono, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Farid, A., Romadi, U., & Witono, D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi petani dalam penerapan sistem tanam jajar legowo di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. 14(1), 27–32.
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi literatur: Landasan dalam memilih metode penelitian yang tepat. 1(2), 259–263.
- Harahap, A. N. (2024). Analisis dampak kebijakan pengendalian harga pangan terhadap daya beli masyarakat (studi kasus pasar tradisional di Kabupaten Labuhan Batu Selatan). 8(3), 956–968. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.27721>
- Helbawanti, O., Saputro, W. A., & Ulfa, A. N. (2021). Pengaruh harga bahan pangan terhadap inflasi di Indonesia. 5(2), 107–116.
- Ibrohim, M., Ardiyansyah, F., & Rudyarta, R. (2025). Strategi Indonesia dalam menekan ketergantungan impor gandum. 5(2).
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan kebijakan moneter*.
- Irhamisyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan dampaknya bagi ketahanan nasional, 45–54.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). *Data perdagangan*.
- Prasetyo, P. M., & Cahyaningrum, I. (2018). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mawardi, K. (2023). Dampak nilai tukar mata uang terhadap perdagangan internasional. 1(4).
- Nuraya. (2025). Dinamika inflasi di Indonesia: Analisis faktor-faktor penyebab dan dampaknya. 4.
- Ompusunggu, D. P., Seftyvelia, O., Azzahra, P. R., & Servia, S. F. (2025). Dampak penurunan harga mata uang terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 9, 15604–15611.
- Pramono. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik* (Sutoyo, Ed.). Surakarta: UNISRI Press.
- Prasetyo. (2025). Langkah Prabowo-Gibran membangun ketahanan pangan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/langkah-prabowo-gibran-membangun-ketahanan-pangan>

- Rassi, Y. W., Olivia, D., Humairoh, F., Melisa, M., Fauziah, N. S., & Nuraya, A. S. (2025). The impact of exchange rate fluctuations on the price stability of imported commodities in Indonesia. 4(6), 1803–1818.
- Simanjuntak, M., Sihotang, J., Nopeline, N., et al. (2025). Analisis pengaruh harga komoditas beras, pengeluaran rumah tangga, dan subsidi pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. 6(2), 323–345.
- Tarumingkeng. (2024). *Inflasi dan ketidakstabilan harga: Memahami inflasi dan ketidakstabilan harga serta faktor-faktor penyebab inflasi di Indonesia*.
- Untoro, H., & Putri, P. (2025). Ketahanan pangan Indonesia: Antara jargon dan realitas. 27(4), 418–430.
- Viona, M., Katanging, D. G., & Candra, M. (2025). Ekonomi politik ketahanan pangan di Indonesia: Peran negara dalam menghadapi krisis pangan. 2(June), 502–508.
- Zain, F. A., Fathiha, H. F., Ria, R., & Hasibuan, A. (2026). Pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia: Analisis dampak ekonomi dan sosial. 153–161.